

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Alasan keamanan mendorong tiap negara untuk membuat senjata nuklir. Tidak heran kalau saat ini senjata nuklir semakin berkembang penyebarannya. Banyak negara yang memiliki kemampuan untuk membuat nuklir. Hal ini menyebabkan terjadinya perlombaan senjata yang bersifat pemusnah massal (*mass destruction*) karena tidak ada satupun negara yang akan merasa aman bila negara rivalnya mengembangkan senjata yang sama. Sehingga selalu saja ada beberapa negara yang ingin terus mengembangkannya meskipun dari sisi lain ada juga upaya beberapa negara untuk mencegah proliferasinya bahkan hingga upaya perlucutan dan pemusnahan senjata nuklir.

Salah satu negara yang "dicurigai" memiliki persenjataan nuklir adalah Iran. Masalah nuklir menjadi masalah yang aktual saat ini, karena berkaitan langsung dengan Amerika Serikat yang berpredikat sebagai negara *super power* telah mengusik keberadaan Amerika. Seperti yang kita tahu, jika ada suatu permasalahan yang dianggap dapat membahayakan Amerika dan sekutunya, maka tidak segan-segan Amerika mengintervensi negara itu.

Letak Iran yang strategis dan juga memiliki sumber daya alam minyak dan gas alam yang melimpah ikut menjadi faktor pendukung dalam intervensi Amerika Serikat di Timur Tengah.

B. Tujuan Penelitian

Penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan Amerika Serikat untuk menghentikan program nuklir Iran dan untuk mengetahui apa saja kepentingan yang ingin dicapai Amerika sehubungan dengan dibukanya kembali program nuklir Iran, karena Amerika Serikat merasa perlu melakukan intervensi kepada negara yang dianggap dapat mengancam dan membahayakan Amerika dan sekutunya. Seperti diketahui hubungan Amerika Serikat dan Iran memburuk ketika terjadi revolusi Islam pada tahun 1979.

C. Latar Belakang Masalah

Telah bertahun lamanya, pejabat tinggi Amerika Serikat memperingatkan berulang kali bahwa Iran memiliki program nuklir yang mengarah kepada pembuatan senjata nuklir. Masalah nuklir Iran menjadi isu internasional setelah Amerika Serikat pada bulan September 2002 menuduh Iran memiliki program rahasia untuk membuat persenjataan nuklir. Amerika Serikat bahkan mendesak Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) agar segera mengambil tindakan dengan menginspeksi dan menyelidiki sejumlah instalasi nuklir Iran di Arak dan Natanz.

Iran adalah anggota yang tergabung dalam Non-Proliferation Treaty (NPT), membolehkan adanya inspeksi terkait dengan program nuklirnya. Meskipun demikian, banyak pengamat mencurigai Iran, yang memiliki cadangan minyak dan gas alam yang berlimpah, menggunakan program nuklir sipilnya hanya sebagai dalih untuk membuat persenjataan nuklir. Kecurigaan ini menguat pada bulan Desember 2002 dengan terungkapnya rahasia dua fasilitas nuklir yang

tengah dibangun di dekat kota Arak dan Natanz yang kemungkinan ditujukan untuk pengayaan uranium, dan untuk memproduksi air berat, terutama untuk memproduksi senjata plutonium.

Reaktor Bushehr, seperti tenaga reaktor komersial, tidak menggunakan air berat. Bulan Februari 2003, merupakan jadwal pemeriksaan dari tim IAEA untuk menginspeksi fasilitas di Iran, presiden Iran saat itu, Mohammad Khatami mengatakan bahwa Iran merencanakan untuk menambang dan mengolah uraniumnya secara mandiri, dan memproses kembali bahan bakar untuk reaktor. Hal ini menjadi bertentangan dengan perjanjian awal yang menyebutkan bahwa proses pengolahan dan pemrosesan ulang uranium akan dilakukan oleh Rusia. Pemrosesan kembali akan memisahkan plutonium, yang dapat digunakan untuk membuat persenjataan, dibawah kontrol Iran. Mohammad Khatami mengatakan nuklir ini akan digunakan untuk tujuan damai guna membangkitkan tenaga listrik bagi rakyat sipil, dan mengundang tim IAEA untuk memeriksa fasilitas nuklir Iran. Namun Amerika Serikat mengatakan ini hanyalah cara bagi Iran untuk memproduksi senjata nuklir yang berbahaya.

Bulan Juni 2003 Ketua IAEA, Mohammad ElBaradei membuat catatan pertanyaan mengenai pengayaan dan proyek air berat. ElBaradei juga memanggil Iran agar menyetujui tindakan usaha perlindungan (*safeguards*) untuk meyakinkan negara-negara lain bahwa semua program nuklir yang dijalankan Iran tidak untuk menyembunyikan program persenjataan nuklir. Bulan Oktober, setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi pemerintahan Iran, ElBaradei menginginkan

agar Iran mau menandatangani protokol tambahan, dan menunda sementara aktifitas pengayaan uraniumnya.

Kecurigaan tentang maksud Iran terungkap pada bulan November 2003, ketika IAEA melaporkan bahwa Iran telah berhasil memproduksi pengayaan uranium serta plutonium, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk bahan bakar senjata nuklir. Meskipun sampai akhir masa penyelidikan oleh pengawas nuklir PBB tersebut tidak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kegiatan nuklir ini mengarah pada produksi senjata nuklir.¹

Laporan lebih lanjut pada bulan Juni 2004 IAEA mengkritik Iran karena tidak bekerjasama secara penuh dalam menjawab seputar pertanyaan menyangkut aktivitas nuklirnya. Dewan IAEA juga menyesalkan sikap Iran yang belum juga meratifikasi protokol tambahan.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat setelah penemuan pengayaan uranium dan fasilitas air berat di Iran, Amerika bertekad akan melaporkan masalah ini ke IAEA dan juga membawa masalah pelanggaran ini ke Dewan Keamanan-Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya untuk menghambat laju proses pengayaan uranium Iran juga dilakukan melalui negoisasi yang terjadi antara Iran dan Tiga Negara Eropa (EU-3), yaitu Inggris, Jerman, dan Perancis di Paris, pada bulan November 2004. Iran setuju untuk melakukan penghentian setelah tercapainya kesepakatan melalui jalur diplomasi demi untuk meredam ketegangan internasional terkait dengan program nuklir Iran tersebut.

¹ www.iranwatch.org , 1 September 2006

Proses perundingan kembali dilanjutkan, pada bulan Agustus 2005. Kali ini Inggris, Perancis dan Jerman yang juga didukung oleh Amerika Serikat menegaskan bahwa satu-satunya jaminan Iran tidak akan menggunakan program nuklirnya sebagai alat untuk memproduksi bom atom adalah negeri itu harus menghentikan seluruh aktivitas nuklirnya. Dalam proposalnya, ketiga negara tersebut mengusulkan agar Iran melakukan pengayaan uraniumnya di Rusia. Usulan itu ditolak Iran karena Iran beralasan setiap negara bebas untuk mengolah dan memproduksi nuklir di negaranya sendiri. Terlebih lagi, usulan yang diberikan perwakilan dari Uni Eropa tersebut dinilai Iran mencerminkan standar ganda Barat. Iran akhirnya membuka fasilitas riset nuklirnya di Isfahan.

Pihak Rusia telah memfokuskan pada upaya untuk merampungkan pembangunan pembangkit tenaga nuklir di Bushrer berdasarkan rancangan reaktornya sendiri, dimana sebelumnya telah dimulai oleh Jerman pada tahun 1970 dibawah kepemimpinan Shah Reza Pahlevi. Proyek ini dulunya menjadi terbengkalai ketika terjadi peristiwa revolusi yang berdampak pada jatuhnya tampuk kekuasaan Shah Reza Pahlevi.

Dalam upaya untuk memprakarsai proyek reaktor Bushrer, presiden Rusia Vladimir Putin telah melakukan pendekatan dengan Amerika Serikat dengan menjamin presiden Bush dalam pertemuan pada bulan Februari 2005 dimana Rusia akan menyuplai bahan bakar untuk reaktor di Bushrer dan mengambil kembali bahan bakar yang telah terpakai. Sehingga, dalam hal ini Iran tidak memerlukan untuk mengembangkan kapabilitas dan fasilitasnya dalam pengayaan uranium. Tanggal 28 Februari wakil presiden Iran Gholamreza Aghazadeh dan

ketua Badan Atom Nasional Rusia, Alexander Rumyantsev menandatangani perjanjian untuk urusan penyediaan bahan bakar.

Namun, pada tanggal 6 Januari 2006 Iran mengejutkan dunia dengan keputusan sepihaknya untuk membuka kembali fasilitas pengayaan uraniumnya dan mencabut segel IAEA di Natanz. Keputusan Iran ini mendapat kecaman keras dari Amerika dan Uni Eropa.

Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, menyatakan bahwa program pengayaan uranium ini diaktifkan kembali guna memproduksi energi untuk listrik karena ini merupakan hak setiap negara untuk menguasai dan mengembangkan energi atom untuk kepentingan positif. Dalih Teheran itu telah membuat Amerika dan sekutunya panik. Amerika menilai Teheran berambisi membuat senjata militer. Bila itu dilakukan, menurut Gary Milhollin, Direktur Proyek Winsconsin atas kontrol senjata nuklir, diperkirakan paling cepat pada 2009 Iran sudah mampu memproduksi bom atom, "Saya akan kaget bila Iran tidak bisa membuatnya dalam lima tahun dengan satu, dua, atau tiga bom," katanya, seperti yang ditulis *The New York Times*.²

Iran beranggapan sikap Amerika Serikat dalam hal nuklir dinilai tidak konsisten dan diskriminatif, Iran yang ikut menandatangani NPT selalu ditentang keras oleh Amerika Serikat, tetapi tidak demikian dengan Israel, India, dan Pakistan yang menolak menandatangani NPT.

Usaha Amerika Serikat untuk menjegal Iran tidak sampai disini saja, AS bahkan kembali menuduh Iran dengan cara melakukan propaganda bahwa nuklir

² Gatra, 28 Januari 2006

Iran adalah berorientasi *offensive*, bahwa Iran menggunakan program nuklirnya hanya untuk menutupi tujuan utamanya atau "*camouflage*" untuk pengembangan program senjata nuklirnya walau Iran menyangkal bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai dan sebagai sumber energi. Ancaman Amerika Serikat selanjutnya adalah menyeret Iran ke Dewan Keamanan PBB (DK-PBB).

Sementara itu, Cina dan Rusia menghadapi dilema. Kedua negara ini memiliki ikatan dan perjanjian ekonomi yang erat dengan Iran. Cina misalnya, tiga tahun lalu mengikat perjanjian dengan Teheran. Isinya, Iran berjanji memasok 13% kebutuhan minyak Cina. Sebaliknya, Cina mengembangkan ladang-ladang minyak baru di Iran.³ Bila sanksi Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) keluar, perekonomian Cina akan ikut terganggu. Sebaliknya, bila Cina memveto keputusan DK-PBB yang akan memberi sanksi ekonomi dan politis kepada Iran, ini dikhawatirkan akan berakibat pada memanasnya tensi hubungan antara Washington dan Beijing.

Minyak memang menjadi senjata ampuh Iran. Jika sanksi dijatuhkan, hal itu akan memicu naiknya harga minyak dunia. Iran akan menurunkan produksi minyaknya sehingga akan terjadi kelangkaan minyak di pasar dunia. Kondisi ini akan dapat menyebabkan negara-negara industri seperti Amerika Serikat menjadi kalang-kabut. Iran menghasilkan minyak terbesar ke dua setelah Saudi Arabia di OPEC.⁴ Ditengah meningkatnya ketegangan krisis nuklir Iran, harga minyak dunia melonjak hingga mencapai 68 dollar per barel.⁵

³ *Ibid.*

⁴ Kompas, Selasa 24 Januari 2006

⁵ Metrotv, 28 Januari 2006

Lokasi Iran memang sangat strategis, karena terletak di kawasan teluk, menguasai teluk Persia dan Selat Hormuz yang merupakan jalur distribusi minyak bumi dan gas alam terbesar dan terpenting di dunia. Kondisi geografis yang sangat strategis di Teluk Persia menjadikan Iran sebagai rute yang paling efisien untuk menyalurkan hasil minyak dan gas alam Asia Tengah menuju pasaran dunia.

D. Pokok Permasalahan.

Apa kepentingan Amerika dibalik penolakan atas dibukanya kembali riset pengayaan uranium di Iran?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Kerangka dasar pemikiran berfungsi sebagai suatu pijakan awal, sehingga dapat dipilih konsep-konsep yang berguna untuk mengamati sebuah permasalahan. Hal ini untuk menunjukkan hubungan timbal-balik antara teori dengan data yang diperoleh dari sumber.

Agar dapat mendeskripsikan, dan menganalisa permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan:

1. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional dapat diartikan secara minimum sebagai suatu kepentingan untuk kesejahteraan umum, hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup (survival) suatu negara, hak kepentingan ekonomi, hak perlindungan hukum. Dalam arti yang lebih khusus yaitu untuk mempertahankan dan memelihara identitas politik dan kulturalnya. Sehingga agar kepentingan

nasionalnya terwujud, suatu negara bisa saja membuat suatu kerjasama atau bahkan konflik sekalipun.⁶

K. J. Holsti menjelaskan, pada dasarnya kepentingan nasional di suatu Negara mencakup empat unsur kepentingan, yaitu:⁷

1. Security (Keamanan)

Merupakan tujuan utama dari setiap Negara untuk mempertahankan diri (*self defence*) dalam artian untuk melindungi penduduk, menjaga wilayah dan kedaulatannya dari ancaman yang membahayakan yang tidak hanya berupa perang atau hal yang bersifat fisik saja, namun juga meliputi penduduk, pemerintah, ideologi, dan ekonominya.

2. Autonomy (Otonomi)

Kemampuan untuk memformulasikan kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri berdasarkan atas prioritas pemerintah sendiri dengan segala resikonya, serta kemampuan untuk menahan tekanan, pengaruh, maupun ancaman dari Negara lain.

3. Welfare (Kesejahteraan)

Faktor yang menjadi tolok ukur keberhasilan dari suatu negara. Contoh Negara yang kurang baik adalah memiliki kekuatan militer yang besar, namun kurang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Tapi sebaliknya, negara dengan

⁶ J. Frankie, *Hubungan Internasional*, terjemahan Laila H. Hasyim, Jakarta, Bumi Aksara, 1991.

⁷ K. J. Holsti, *International Politics: A Framework For Analysis*, New York Prentice Hall International Inc, 1995. hal.137.

militer yang lemah namun memiliki perhatian yang besar terhadap kesejahteraan rakyatnya adalah negara yang baik.

4. Prestigious (Peningkatan Status)

Keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ikut memegang peranan penting selain pandangan tradisional yang menganggap sumber utama status adalah kekuasaan militer. Contohnya negara-negara yang sedang berkembang dalam mengubah status menjadi negara industri.

Menurut H. J. Morgenthau, esensi politik luar negeri adalah kepentingan nasional, sehingga politik luar negeri suatu negara didasarkan kepada kepentingan domestik, atau politik luar negeri merupakan perpanjangan tangan dari politik dalam negeri yang terangkum dalam kepentingan nasional.⁸

Jack C. Plano dan Roy Olton mendefinisikan kepentingan nasional sebagai:

"The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements that constitute the state's most vital needs. These include self preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well being."⁹

⁸ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990. hal. 164.

⁹ Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, Holt, Rinehart and Winston, Inc., Western Michigan University: New York, 1969, hal. 128.

Mengenai pembicaraan kebijakan luar negeri yang diambil sebuah negara selalu dimulai dengan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional sebuah negara akan lebih mudah dicapai jika diikuti dengan kekuatan nasionalnya.¹⁰

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar power (kekuasaan), yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan "pengendalian" suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama terhadap negara lain.¹¹

2. Kebijakan Luar Negeri

Kajian mengenai teori proses pembuatan keputusan luar negeri (*the decision making process*) menjelaskan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai hasil berbagai alternatif yang ada dengan optimalisasi hasil (yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan kerugian yang sekecil-kecilnya). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka terapkan.¹²

Kebijakan Luar Negeri itu sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut (Hans J. Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations*):

¹⁰ Jack Plano & Roy Olton, *The International Relations Act Dictionary*. (New York: Rinehart)

¹¹ Mohtar Mas'oed, *op.cit.*, hal. 143.

¹² Mohtar Mas'oed, *op.cit.*

Foreign policy is strategy or planned of course action developed by the decision makers of a state vis a vis other state or international entities aimed at achieving specific goals defined of national interest".¹³

Teori Pembuat keputusan mengidentifikasi sejumlah besar variabel yang relevan dan mengemukakan saling keterkaitan yang mungkin ada dari berbagai variabel tersebut. Teori ini mengarah langsung kepada perilaku manusia yang khusus pembuat keputusan yang sesungguhnya membentuk kebijaksanaan pemerintah, yaitu "mereka yang tindakan otoratifnya, baik maksud maupun tujuannya, adalah tindakan negara. Tindakan negara adalah tindakan yang diambil oleh mereka yang melakukannya atas nama negara."¹⁴

Ambruknya Uni Soviet menandai berakhirnya sistem dunia yang bipolar sekaligus menandai usainya era 'cold war'. Keruntuhan kekuatan Blok Timur tersebut memunculkan AS -tokoh utama kekuatan Blok Barat- sebagai satu-satunya negara dunia yang memegang status 'super power'. Masalah keamanan menjadi hal mutlak yang diperlukan bagi setiap negara. Dengan banyaknya negara-negara yang mengembangkan energi nuklir seperti di Iran tentu akan membahayakan Amerika sebagai negara dengan kekuatan terbesar di dunia saat ini. Maka untuk mencegah adanya kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan eksistensi dari Amerika Serikat, Amerika Serikat terkadang melakukan intervensi terhadap suatu negara.

¹³ Morgenthau, Hans J, Politik Antar Bangsa, Yayasan Obor Indonesia, 1990.

¹⁴ James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations; A Comprehensive Study*, terjemahan Amien Rais, Harwanto Dahlan dan Tulus Warsito (Yogyakarta: Fisipol UMY, 1995), hal. 373.

Masalah alam demokrasi yang sedang berkembang di Timur Tengah juga menjadi salah satu alasan mengapa Amerika begitu kukuh berada di Timur Tengah, ini sesuai dengan dasar-dasar politik Amerika yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Amerika merasa berkewajiban untuk melindungi dan menjaga negara di Timur Tengah yang menganut paham demokrasi seperti Israel, serta melakukan embargo atas negara yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasionalnya.

Sebagai negara industri Amerika sangat bergantung perekonomiannya dalam hal minyak dengan negara Timur Tengah. Maka setiap kebijakan luar negerinya harus sejalan dengan kebijakan dalam negerinya. Kepentingan akan minyak membuat Amerika sampai melindungi Kuwait terhadap agresi dari Irak. Kemudian peperangan atas dasar terorisme di Afghanistan disinyalir juga berdasarkan atas kepentingan ekonomi Amerika, yaitu minyak.

Keunggulan dan teknologi Amerika dalam hal persenjataan dan teknologi nuklir yang ditunjang dengan kemampuan militer yang kuat telah menjadikan Amerika sebagai negara yang super power. Kemampuan Amerika dalam hal penguasaan nuklir tentu saja menguntungkan. Nuklir dapat berguna sebagai alternatif energi yang menjanjikan atas pemakaian sumber alam yang tak terbarui (minyak) yang terbatas. Selain itu penjualan sejumlah reaktor ke negara lain akan menambah devisa bagi Amerika.

Tindakan Iran yang ikut mengembangkan teknologi nuklir menjadikan Amerika resah. Meskipun Iran mengatakan nuklir yang mereka kembangkan adalah untuk tujuan damai dan adalah hak setiap negara untuk mensejahterakan

rakyatnya, Amerika menilai nuklir Iran sebagai suatu ancaman. Dalam permasalahannya dengan Iran, Amerika Serikat tidak ingin gegabah segera melancarkan invasi militer, mengingat banyaknya kecaman tentang perang, bahkan dari warga negaranya sendiri. Iran pun adalah negara yang tangguh, meskipun telah di embargo Amerika Serikat selama puluhan tahun, negaranya tetap stabil. Jika Amerika tidak memilih jalur diplomasi dari pihak lain, invasi militer ini akan berdampak besar terhadap Amerika dan sekutu-sekutunya.

F. Hipotesa

- Mencegah perkembangan nuklir Iran yang dapat mengancam keamanan Israel dan kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Timur Tengah.
- Meminimalisir Pengaruh Rusia dan Cina.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai penulis dalam membantu penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder, seperti buku perpustakaan, artikel, media cetak seperti koran, majalah, jurnal, dan media elektronik seperti televisi, radio dan internet sebagai bahan acuan.

H. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasan dengan maksud untuk mempermudah analisa yang akan dilakukan sehingga penulisan menjadi jelas. Adapun batasan yang dipilih adalah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 tanpa mengabaikan kejadian-kejadian di waktu lain yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

I. Kerangka Penulisan

Kerangka Penulisan sebagai berikut:

BAB I

- A. Alasan Pemilihan Judul
- B. Tujuan Penelitian
- C. Latar Belakang Masalah
- D. Pokok Permasalahan
- E. Kerangka Dasar Pemikiran
- F. Hipotesa
- G. Metode Pengumpulan Data
- H. Jangkauan Penelitian
- I. Kerangka Penulisan

BAB II Arah Kebijakan Amerika Serikat

- A. Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Amerika Serikat
 - a. Politik Luar Negeri Amerika Serikat
 - b. Aktor-aktor dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat
 - c. Hubungan Amerika Serikat dengan Timur Tengah
- B. Hubungan Amerika Serikat dan Iran
 - a. Hubungan Amerika Serikat dan Iran di masa Lalu
 - b. Hubungan Amerika Serikat dan Iran Pasca Runtuhnya WTC
- C. Hubungan Amerika Serikat dengan Israel

BAB III Program Nuklir Iran

A. Isu Nuklir Iran

- a. Riwayat Nuklir Iran
- b. Peran Strategis Nuklir Iran
- c. Ancaman Nuklir Iran

B. Politik Luar Negeri Iran

BAB IV Kepentingan Amerika Serikat terhadap Program Nuklir Iran

A. Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Amerika Serikat dan Israel

- a. Kepentingan dan Keamanan Amerika Serikat
- b. Kepentingan dan Keamanan Zionis Israel

B. Kepentingan Ekonomi

C. Meminimalisir Pengaruh Rusia dan Cina

BAB V Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA